

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

# Ekspor Pasir Timah Digagalkan

Produk Asal China Ditahan

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 30 peti kemas berisi pasir timah siap ekspor digagalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rencananya, pasir timah itu bakal diekspor ke China dan Malaysia. Kerugian negara dari sektor pajak diperkirakan sebesar Rp 27,648 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi di Jakarta, Selasa (7/10), mengatakan, penahanan (penegahan) ekspor pasir timah bercampur pasir alam sudah berlangsung dalam tiga bulan terakhir. Namun, kasus ini baru dapat dipublikasikan mengingat proses penangkapan tersangka membutuhkan waktu.

"Pasir timah ini didatangkan dari Bangka, Ketapang, dan Surabaya. Kelihatannya semua dikumpulkan di Jakarta untuk diekspor dengan berbagai kamuflase dokumen," kata Anwar.

Berdasarkan kegiatan intelijen Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai serta Kantor Pelayanan Umum (KPU) BC Tipe A Tanjung Priok, ke-30 peti kemas itu dikirim dengan menggunakan tiga dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) terpisah.

Ekspor pertama dilakukan CV LA menggunakan kapal MV Reflection Voy N067 sebanyak 15 peti kemas seberat 384 metrik ton dengan tujuan ekspor Fuzhou Shengsheng Mining Industry Co Ltd, Fujian, China.

Kemudian, BC juga menahan 10 peti kemas pasir timah seberat 200 metrik ton yang akan diekspor CV IB dengan kapal MV Cape Norman Voy 8007 dengan tujuan ekspor LSK Enterprise Sdn Bhd Perak, Malaysia.

Lima peti kemas pasir timah terakhir seberat 120 metrik ton direncanakan diekspor oleh PT LMI dengan kapal Barent Strait

Voy 816N. Adapun tujuan ekspornya Maoming Kaisheng Development Co Ltd, China.

Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen BC Agung Kuswandono mengatakan, pasir timah dan pasir alam merupakan jenis barang yang dilarang untuk diekspor. "Barang itu telah diuji di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Jakarta, dan laboratorium PT Timah Tbk," ujar Agung.

Selain menahan pasir timah, Ditjen BC juga menahan 170 peti kemas berisi aneka produk China, mulai dari mainan tulang anjing, tekstil, garmen, hingga peralatan elektronik.

Bahkan, ada pula satu peti kemas yang dokumen impornya dipalsukan. Saat dibuka, peti hanya berisi minuman ringan, tetapi ternyata bagian dalamnya berisi ribuan bir kalengan.

Anwar menegaskan, Ditjen BC memperketat kemungkinan masuknya produk impor dari negara yang kehilangan pasar di Amerika Serikat.

Modus penyelundupan makin bervariasi. Tekstil, misalnya. Produk China itu diimpor dari Port Klang, Malaysia, ke Kuching. Kemudian, masuk ke Pontianak melalui darat dan dikirim melalui pelabuhan antarpulau.

Menurut Anwar, tugas Ditjen BC sangat berat, apalagi Batam, Bintan, dan Karimun sekarang ini ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat.

(OSA)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
--	---

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
--	--	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	<b>OKT</b>	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 15											TAHUN 2008																			

**BATUBARA**

**Cape Range Akuisisi Metro**

SINGAPURA – Cape Range Wireless Ltd, perusahaan yang tercatat di Bursa Singapura, Senin (6/10) menyatakan telah mengakuisisi 20% saham Metro Consolidated Pte Ltd senilai Sin\$ 400 ribu atau sekitar Rp 2,65 miliar secara tunai dan menerbitkan 65 juta saham. Berita yang dilansir situs *alacrastore.com* di Singapura, kemarin, menyatakan, Cape Range juga berpeluang menguasai 100% saham Metro tanpa ada tambahan dana apa pun, kecuali pembayaran Sin\$ 5 juta atau sekitar Rp 33,16 miliar bila cadangan batubara yang dimiliki mitra Metro di Indonesia sedikitnya 10 juta ton. Di Indonesia, Metro Consolidated memiliki anak usaha PT Metro Consolidated Resources (MCR). Bekerja sama dengan PT Batu Besar Mega Nusantara, MCR menjadi kontraktor pertambangan batubara di Kalimantan Selatan milik PT Senamas Energindo Mulia yang memiliki izin perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dari pemerintah pusat. (her)

54

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP <b>OKT</b> NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 <b>8</b> 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 15		TAHUN 2008

**MENYIGI KOMITMEN INCO DI INDONESIA (BAGIAN 1 DARI 2 TULISAN)**

## *Kerikil Tajam dari Pemprov Sultra*

**P**T International Nickel Indonesia Tbk (Inco) harus henggang dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Teriakan tersebut lantang dilontarkan Gubernur Sultra Nur Alam. Alasannya sederhana, menurut Nur Alam, kehadiran Inco tidak memberikan manfaat bagi rakyat Sultra.

Nur Alam pun menilai, Inco telah melakukan sejumlah pelanggaran seperti tidak membangun pabrik pengolahan (*smelter*), menjual *ore* langsung ke konsumen, dan melakukan pertambangan di hutan lindung.

Nur Alam kemudian mengadukan hal tersebut ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, dia meminta kontrak karya (KK) Inco dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Anehnya, pihak Inco belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait klaim Nur Alam tersebut. Manajemen Inco lebih memilih diam. Direktur Media,

Komunikasi, dan Lisensi Inco Jannus TH Siahaan hanya mengatakan, perseroan selalu mengikuti aturan hukum yang diterapkan pemerintah Indonesia berdasarkan KK.

"Apa yang dilakukan Inco telah sesuai koridor hukum yang berlaku. Inco tetap berkomitmen melakukan investasi di Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," katanya singkat kepada *Investor Daily* di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Jannus, pemutusan KK tidak bisa dilakukan sepihak. Sebab, proses penandatanganan KK berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, yaitu antara Inco dengan pemerintah Indonesia.

Apa yang dikatakan Jannus bisa benar. Sebab, dalam KK Inco terdapat berbagai klausul tentang hak, kewajiban, dan pasal yang mengatur jalan keluar bila terdapat masalah antara para pihak.

### Sejarah Inco

Inco masuk ke Indonesia sejak 25 Juli 1968, berdasarkan akta pendirian. Sementara, KK Inco pertama kali diteken pada 27 Juli 1998. Masuknya Inco ke Indonesia dimulai sejak 1967, ketika pemerintah Indonesia mengundang sejumlah perusahaan diseluruh dunia untuk mengajukan proposal eksplorasi dan pengembangan kandungan mineral di Kepulauan Sulawesi.

Inco, dahulu bernama Inco Limited, pun kemudian mengirimkan tim ahli geologi ke Sulawesi untuk mengumpulkan data dan menjelaskan kemampuan Inco. Pada Januari 1968, Inco terpilih di antara enam perusahaan yang mengikuti seleksi akhir negosiasi KK dengan pemerintah Indonesia.

"Inco baru memulai periode komersialnya pada 1978-1986. Saat itu, Inco telah mengalami kerugian keuangan hingga US\$ 416 juta. Bayangkan, betapa seriusnya kami

melakukan investasi di Indonesia," jelas Jannus.

Menariknya, pernyataan Nur Alam yang menyebutkan kehadiran Inco tidak memberikan manfaat bagi rakyat Sultra berbanding terbalik dengan kenyataan.

Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih kurang dari 30 tahun di Indonesia, bagi Inco, masyarakat lokal yang sejahtera adalah jembatan untuk mewujudkan salah satu tujuan perusahaan.

Ini terlihat dari dana untuk program pembangunan masyarakat yang dikucurkan Inco. Pada 2007, Inco mengucurkan dana US\$ 5,9 juta, sementara tahun ini, Inco menganggarkan dana US\$ 7,4 juta untuk program pengembangan masyarakat. Aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan Inco mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, program sosial, dan pengembangan infrastruktur. **(heriyono)**

HUBUNGAN MASYARAKAT  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE:  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI  
 GEOLOGI

- UMUM  
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2008

# Penambang dari Luar Bombana Dipungut Rp 500.000

Kendari – Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) kini sedang menggodok ketentuan tentang warga dari luar wilayah Bombana yang akan menambang emas di Sungai Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu.

Oleh  
**AGUS SANA'A**

Setiap penambang dari luar Bombana diwajibkan mengurus KTP Bombana dan ID Card, serta membayar retribusi kepada pemerintah daerah senilai Rp 500.000. "Aturan itu masih dibahas pihak eksekutif dan legislatif. Makanya, sebelum aturan itu disepakati bersama, penambang dari luar Bombana belum diizinkan masuk kawasan penambangan untuk mendulang emas," ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bombana, La Angi kepada SH melalui telepon, Selasa (7/10) pagi.

Menurut La Angi, Pemerintah Kabupaten Bombana memperketat aturan bagi para penambang emas bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melindungi kawasan penambang itu dari kerusakan lingkungan yang lebih parah. Ini karena dengan jumlah penambang liar sebelum Lebaran lalu yang mencapai 50.000 orang, kerusakan lingkungan yang ditim-

bulkannya sudah mulai tampak. Sejumlah pohon di sekitar sungai mulai tumbang, dan sebagian ditebang untuk keperluan penambang membuat tenda-tenda darurat di kawasan penambangan.

"Dengan pemberlakuan aturan yang cukup ketat, diharapkan jumlah penambang tidak terlalu besar, sehingga kerusakan alam yang ditimbulkan juga tidak terlalu luas," jelas La Angi.

#### **Tiga Bahaya Mengancam**

La Angi melihat ada tiga bahaya besar yang saat ini mengancam warga Bombana terutama warga yang bermukim di sekitar kawasan tambang dan daerah aliran Sungai Tahi Ite. Ketiga bahaya besar itu masing-masing penyakit kolera yang bersumber dari kotoran puluhan ribu penambang, bahaya banjir akibat kerusakan lingkungan dan dampak sosial seperti pemerkosaan dan perampokan.

"Cepat atau lambat, ketiga bahaya besar itu pasti muncul. Kalau bahaya itu sudah melanda warga, yang menjadi korban warga Bombana sendiri. Makanya, untuk melindungi warga,

Pemkab memberlakukan aturan ketat bagi para penambang," tuturnya.

Pemkab Bombana kata La Angi berharap pemerintah pusat segera mengambil alih kawasan penambangan itu, agar aktivitas warga menambang liar bisa dihentikan.

Keterangan serupa diungkapkan Hado Hasina, Wakil Kepala Dinas Energi dan Pertambangan Sultra. Menurutnya, jika kawasan itu dibiarkan ditambang secara liar, warga Bombana yang bermukim di sekitar Sungai Tahi Ite berada dalam ancaman bahaya besar.

"Bahaya yang segera muncul, wabah berbagai jenis penyakit yang bersumber dari kotoran manusia. Bahaya banjir dan dampak sosial lainnya pasti menyusul. Makanya, kawasan itu harus secepatnya diambil alih pemerintah," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penambang yang dibolehkan mendulang emas di kawasan penambangan setelah dihentikan sementara, hanya warga yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Bombana dan ID Card yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Menurut Mas Dedy, bagi warga yang berasal dari luar Kabupaten Bombana yang ingin mendulang emas, harus lebih dahulu mengurus KTP Bombana dan ID Card. Untuk mendapatkan kedua

kartu identitas tersebut, penambang harus mengeluarkan biaya Rp 200.000. Sebanyak Rp 100.000 untuk biaya KTP dan ID Card Rp 100.000 pula.

Mas Dedy mengaku tidak langsung mengurus kedua identitas tersebut karena saat berangkat ke Bombana tidak membawa persiapan uang yang cukup. "Kita dan kawan-kawan berangkat ke Bombana hanya modal peralatan menambang dan sedikit bekal makanan instan. Kita pikir, setelah menambang sudah bisa mendapatkan uang. Tapi karena tidak dibolehkan masuk lokasi penambangan tanpa KTP dan ID Card, terpaksa kita pulang. Kita cari modal dulu untuk berangkat kembali ke Bombana," ujarnya.

Keterangan serupa diungkapkan Agus Sadewo, warga asal Kota Kendari. Menurutnya, selain mengurus KTP dan ID, yang datang dari luar Bombana untuk menambang emas akan dipungut Rp 500.000.

"Informasi dari petugas yang menjaga ketat jalan masuk kawasan penambangan seperti itu. Kita warga dari luar Bombana harus memiliki KTP Bombana dan membayar Rp 500.000. Katanya ketentuan itu masih dibahas pemerintah daerah dan akan selesai dalam waktu dekat," kata Agus yang baru tiba dari Bombana. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

## Proyek Meratus Tertunda

**JAKARTA (SINDO)**—Pembangunan pabrik baja baru kerja sama PT Krakatau Steel (KS) dan PT Aneka Tambang (Antam) di Kalimantan Selatan senilai USD60 juta tertunda. Rencananya, pemancangan tiang pertama (*ground breaking*) dilakukan November, tetapi kemudian diundur menjadi Desember 2008.

Direktur Utama PT Meratus Jaya Iron & Steel, anak perusahaan gabungan KS dan Antam, Anwar Ibrahim mengatakan, mundurnya rencana tersebut akibat kendala dalam tender konstruksi dan finalisasi institusi pembiayaan proyek tersebut. Dia menjelaskan, saat ini proyek itu masih dalam tahap seleksi kontraktor.

"Sekarang tinggal tersisa tiga kontraktor yang perlu diseleksi lebih lanjut," paparnya di Jakarta kemarin.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa saja yang masuk dalam nominasi kontraktor proyek tersebut, Anwar enggan menjelaskannya. Proses pemilihan kon-

traktor ini, menurut dia, membuat rencana pemancangan tiang pertama PT Meratus di Kalsel menjadi sedikit mundur. "Targetnya tanggal 1 Desember 2008 mendatang *ground breaking* akan terealisasi," ujar Anwar.

Untuk masalah pendanaan, Anwar mengatakan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah positif untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan pabrik baru itu. Sementara Bank Mandiri yang sebelumnya terlibat menyatakan mundur dari proyek itu. "Sebelumnya kan sindikasi pendanaan ikut ditanggung Bank Mandiri. Tapi Mandiri mundur," ucapnya.

Dari total dana yang digunakan, menurut Anwar, BRI akan menanggung 65% dana investasi pembangunan pabrik baru di Kalsel itu. Sisanya sekitar 35% berasal dari ekuitas PT Meratus.

Sekretaris Perusahaan PT KS Raden Gunawan mengatakan, proses teknis pemilihan sumber pendanaan dan

kontraktor memang cenderung sulit. Hal ini, menurut dia, berkaitan dengan masalah teknis yang kian muncul sehingga mengganggu jadwal yang telah ditentukan.

"Kalau mundur karena masalah teknis, itu hal yang wajar. Yang pasti KS tetap menargetkan pembangunan pabrik baru ini dilakukan pada akhir tahun ini agar bisa berproduksi akhir tahun 2009," ujar Raden.

Direktur Utama KS Fazwar Bujang pernah mengatakan, pabrik ini akan dibangun di atas areal seluas 200 ha di Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Fazwar menjelaskan, untuk tahap awal Meratus hanya akan menghasilkan besispons, sedangkan proses peleburannya akan dilakukan di pabrik milik KS di Cilegon. "Secara bertahap kami juga akan masuk ke sektor baja hilir sehingga gabukan hanya besispons yang diproduksi, melainkan juga *billet* dan *wire rod*," ujarnya.

(agung kurniawan)